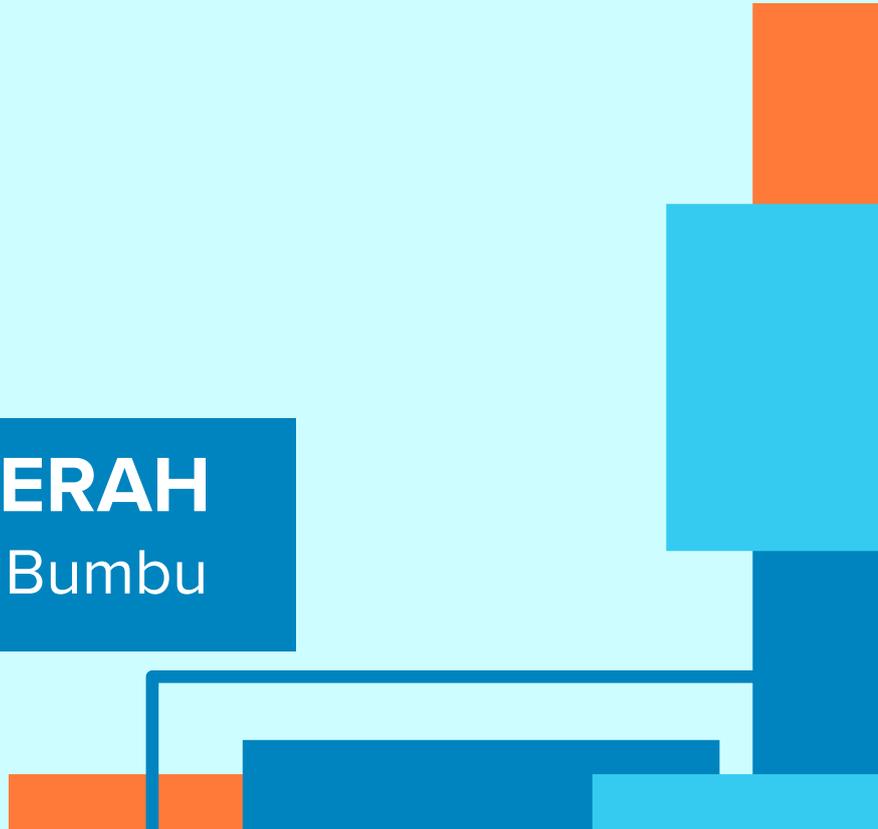


**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2025**

SEKRETARIAT DAERAH
kabupaten Tanah Bumbu



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunia_Nya kepada kita, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat diselesaikan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan Output (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan serta mengetahui produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya kebijakan atau program, berdasarkan input (masukan) yang digunakan.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Gunung Tinggi, September 2025
Sekretaris Daerah,

Yulian Herawati, S.E.,M.M.,CGCAE.,CFrA.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19790727 200604 2 042

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam sebuah sistem maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP dan menegaskan agar setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, Akuntabilitas Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kewenangannya melalui berbagai kegiatan pembangunan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangannya dapat disajikan. Adapun penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya guna mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yang dituangkan dalam 3 (tiga) program yaitu. yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Landasan Hukum | 1-2 |
| C. Maksud dan Tujuan | 2-3 |
| D. Gambaran Umum Organisasi | 3-7 |
| E. Sumber Daya Aparatur | 8-10 |
| F. Sarana dan Prasarana | 11 |
| G. Isu Strategis Perangkat Daerah..... | 11-12 |
| H. Sistematika Laporan | 13 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | |
| A. Perencanaan Strategis | 14-15 |
| B. Strategi dan Arah Kebijakan | 15-17 |
| C. Tujuan dan Sasaran | 18-21 |
| D. Program dan Kegiatan..... | 22-24 |
| E. Indikator Kinerja Utama | 28-29 |
| F. Rencana Kerja..... | 29-32 |
| G. Perjanjian Kinerja | 33-37 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | |
| A. Definisi Akuntabilitas Kinerja..... | 38-39 |
| B. Kerangka Pengukuran Kinerja | 39 |
| C. Capaian Kinerja Organisasi | 40-56 |
| D. Rekomendasi dan Tindaklanjut..... | 57-60 |
| E. Realisasi Anggaran..... | 60-67 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Penutup | 68-70 |
| B. Lampiran | |

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

| | |
|--|-------|
| Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi..... | 7 |
| Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah | 8 |
| Tabel 1.2 Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pangkat/Golongan | 10 |
| Tabel 1.3 Aset Tetap Sekretariat Daerah | 11 |
| Tabel 1.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan..... | 16-17 |
| Tabel 1.5 Tujuan dan Indikator Sekretariat Daerah | 19 |
| Tabel 1.6 Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah | 19 |
| Tabel 1.7 Penetapan Kinerja berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029 | 20-21 |
| Tabel 1.8 Program/Kegiatan Pendukung RPJMD Sekretariat Daerah..... | 23-24 |
| Tabel 1.9 Indikator Kinerja Utama..... | 28-29 |
| Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahun 2025 | 30-32 |
| Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah..... | 33 |
| Tabel 2.3 Anggaran program/kegiatan dan sub kegiatan dalam perjanjian kinerja | 34-37 |
| Tabel 2.4 Pengukuran Skala Capaian | 40 |
| Tabel 2.5 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja..... | 42 |
| Tabel 2.6 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan II dengan beberapa tahun lalu dan beberapa tahun terakhir..... | 43 |
| Tabel 2.7 Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II dengan target jangka menengah (Renstra) | 44 |
| Tabel 2.8 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan II tahun 2025..... | 46 |
| Tabel 2.9 Perbandingan antara Sekretariat Daerah Kab. Tanah Bumbu dengan Sekretariat Daerah Kota Banjar | 47 |
| Tabel 3.1 Efisiensi Pengguna Sumber Daya Triwulan II 2025 | 50 |
| Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Triwulan II tahun 2025 | 61-67 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 1.1 Pengelompokan Berdasarkan Jenis Kelamin | 9 |
| Grafik 1.2 Pengelompokan Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 9 |
| Grafik 1.3 Berdasarkan Pangkat dan Golongan | 10 |
| Grafik 1.4 Efisiensi pengguna sumber daya Sekretariat Daerah | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025. Isi dari laporan ini merupakan gambaran pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu :

1. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024;

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hal tersebut untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai tingkat pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh instansi selama tahun anggaran berjalan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan



b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan.
2. Menyampaikan hasil capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
3. Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan.
4. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tertentu secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun yang akan datang.
6. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

D. Gambaran Umum Organisasi

Susunan organisasi serta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi tentang pengendalian dan interaksi antara pimpinan dan bawahan serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sekretariat Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah, bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Staf Ahli Bupati, 3 (tiga) Asisten Daerah, 9 (sembilan) Kepala Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretariat



Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- 4) pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah, maka susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- 1) Sekretaris Daerah
- 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- 3) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
- 4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- 5) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, yang membawahi :
 - a) Bagian Pemerintahan
 - Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
 - Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
 - Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
 - b) Bagian Hukum
 - Sub Bagian Perundang-undangan
 - Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
 - Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi



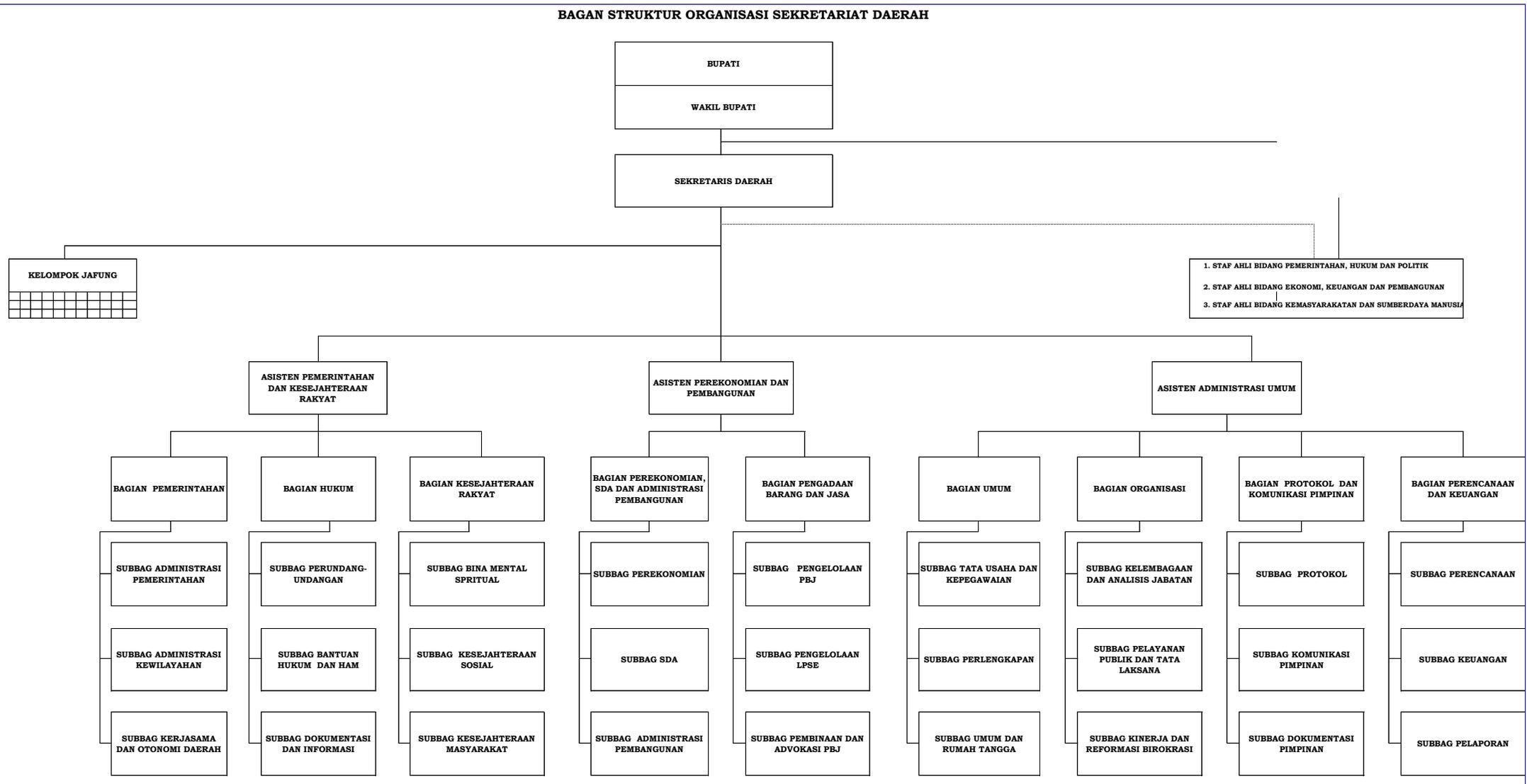
- c) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Sub Bagian Bina Mental Spiritual
 - Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
 - Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
- 6) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi :
 - a) Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan
 - Sub Bagian Perekonomian
 - Sub Bagian Sumber Daya Alam
 - Sub Bagian Administrasi Pembangunan
 - b) Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 - Sub Bagian Pengelolaan PBJ
 - Sub Bagian Pengelolaan LPSE
 - Sub Bagian Pembinaan dan advokasi PBJ
- 7) Asisten Administrasi Umum, yang membawahi :
 - a) Bagian Umum
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perlengkapan
 - Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga
 - b) Bagian Organisasi
 - Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Sub Bagian Protokol
 - Sub bagian Komunikasi Pimpinan
 - Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan
 - d) Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Pelaporan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang bertugas membantu Sekretariat Daerah di bidang sesuai dengan keahliannya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



Adapun gambar bagan struktur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu :



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi



E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dalam menjalankan tugas membantu Bupati, Sekretariat Daerah memiliki peranan penting dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Oleh karena itu, kapasitas dan kompetensi SDM Sekretariat Daerah perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung kinerja instansi dan pencapaian target-target prioritas.

Guna menghadapi perkembangan teknologi modern dan berbagai perubahan sistem pada pemerintahan harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai, berkualitas dan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Berikut tabel mengenai ASN dan Non ASN pada Sekretariat Daerah per 30 Juni tahun 2025 :

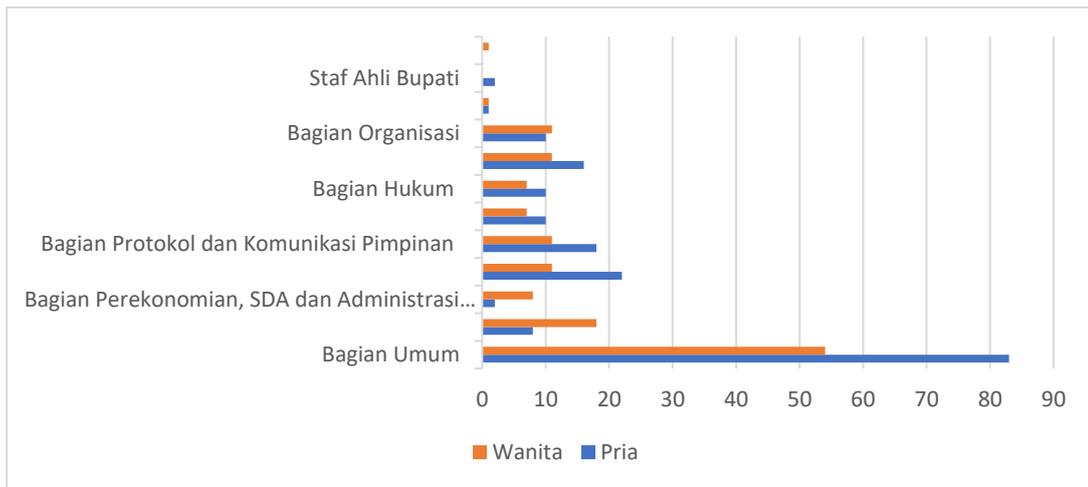
Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah
Per 30 Juni tahun 2025

| Unit Kerja | Jenis Kelamin | | Pendidikan | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|------|-----|----|----|----|----|------|------|----|
| | L | P | S.III | S.II | S.I | D4 | D3 | D2 | D1 | SLTA | SLTP | SD |
| Sekretaris Daerah | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Staf Ahli Bupati | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asisten Sekretariat Daerah | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bagian Umum | 83 | 54 | - | 2 | 27 | - | 4 | - | - | 64 | 15 | 25 |
| Bagian Perencanaan dan Keuangan | 8 | 18 | - | 3 | 11 | - | 1 | - | - | 10 | 1 | - |
| Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan | 2 | 8 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 22 | 11 | - | 3 | 22 | - | 2 | - | - | 6 | - | - |
| Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 18 | 11 | - | - | 18 | - | 1 | - | - | 10 | - | - |
| Bagian Pemerintahan | 10 | 7 | - | 2 | 8 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - |
| Bagian Hukum | 10 | 7 | - | 1 | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Bagian Kesejahteraan Rakyat | 16 | 11 | - | - | 15 | - | - | - | 1 | 11 | - | - |
| Bagian Organisasi | 10 | 11 | - | 4 | 9 | - | 1 | - | - | 7 | - | - |
| JUMLAH | 182 | 140 | | | | | | | | | | |



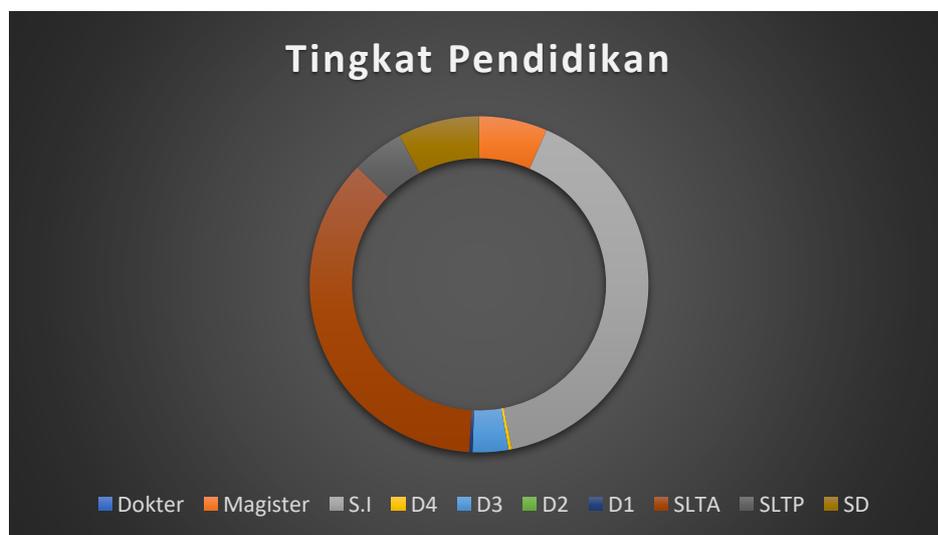
Berdasarkan tabel 1.1 jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang. 182 (seratus delapan puluh dua) orang pegawai adalah pria dan pegawai wanita sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang. Grafik pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 di bawah ini.

Grafik 1.1
Pengelompokan Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan tabel 1.1 tingkat pendidikan pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 7% dengan pendidikan Magister (S.II), 40% dengan pendidikan Sarjana (S.I), 3% dengan pendidikan D3, 36% dengan pendidikan SLTA, 5% dengan pendidikan SLTP dan 8% dengan pendidikan SD. Grafik pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.2 di bawah ini

Grafik 1.2
Pengelompokan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

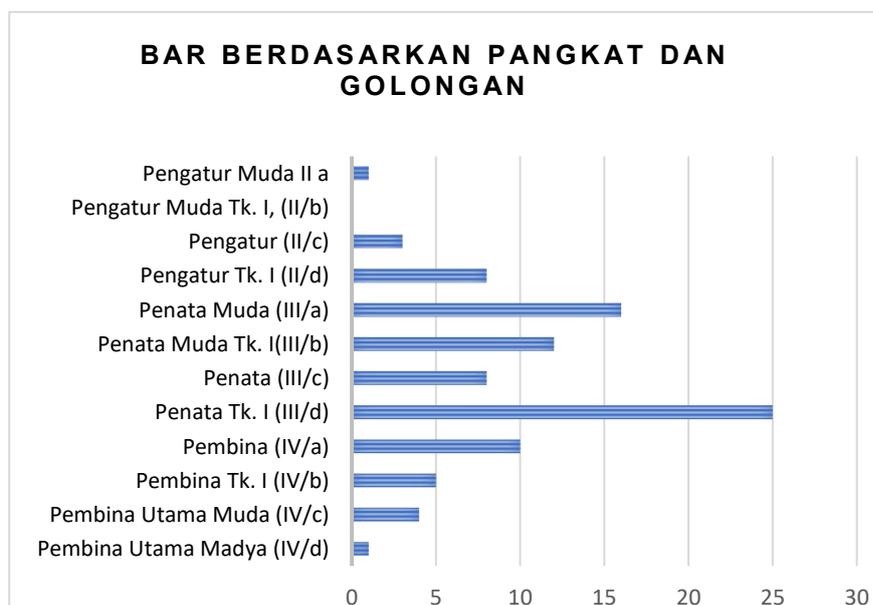


Tabel 1.2
Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pangkat/Golongan
Tahun 2025

| NO | PANGKAT | JUMLAH (ORANG) |
|---------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
| 2 | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
| 3 | Pembina Tk. I (IV/b) | |
| 4 | Pembina (IV/a) | |
| 5 | Penata Tk. I (III/d) | |
| 6 | Penata (III/c) | |
| 7 | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
| 8 | Penata Muda (III/a) | |
| 9 | Pengatur Tk. I (II/d) | |
| 10 | Pengatur (II/c) | |
| 11 | Pengatur Muda Tk. I, (II/b) | |
| 12 | Pengatur Muda II a | |
| JUMLAH | | 93 |

Berikut grafik pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada grafik 1.2 di bawah ini :

Grafik 1.3
Berdasarkan Pangkat dan Golongan



F. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang memadai berkontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi kerja, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas pelaksanaan program Sekretariat Daerah. Evaluasi berkala terhadap kondisi sarana prasarana dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan mendukung pencapaian indikator kinerja utama. Sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Aset Tetap Sekretariat Daerah
Per 30 Juni 2025 (Triwulan II)

| Kode Rekening | Uraian | Nominal | Keterangan |
|---------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 1.3.02.05 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 614.430.950,00 | |
| 1.3.02.06 | Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 296.000.000,00 | |
| 1.3.02.10 | Komputer | 666.952.200,00 | |
| 1.3.05.01 | Bahan Perpustakaan | 1.367.436.180,00 | |
| Total | | 2.944.819.330,00 | |

G. Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa yang akan datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau



hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis Sekretariat Daerah yang merupakan hasil dari proses diskusi.

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- Ketersediaan Anggaran yang perlu ditingkatkan guna menunjang Program dan Kegiatan di Bagian Pemerintahan.
- Masih terdapat konflik batas wilayah antar desa/kecamatan.
- Kesempatan dan Anggaran untuk peningkatan kapasitas dan Kompetensi JFT Perancang Perundang-Undangan yang harus di tingkatkan.
- Ketersediaan Aparatur Sipil Negara dengan status PNS yang menduduki jabatan Analis Hukum yang masih kosong.
- Belum optimalnya pengelolaan hibah dan bantuan sosial secara transparan dan akuntabel.
- Kurangnya pengembangan kapasitas masyarakat lokal.
- Lemahnya sinergi dan integrasi program antar-OPD.
- Lambatnya proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek.
- Ketersediaan Anggaran yang perlu ditingkatkan guna menunjang Program dan Kegiatan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa terutama untuk sarana dan prasarana.
- Masih adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi pengadaan.
- Belum optimalnya pengelolaan aset dan fasilitas perkantoran.
- Kurang Sumber Daya Manusia yang berkompetensi.
- Belum optimalnya Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE Sakip.
- Belum optimalnya Fasilitasi Predikat Nilai Rata-Rata PEKPPP Mandiri.



H. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang serta maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), uraian singkat gambaran organisasi, dasar hukum dan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas mengenai tentang strategi dan arah kebijakan, rencana strategis Sekretariat Daerah tahun 2025-2029, program dan kegiatan serta Indikator kinerja utama dan juga perjanjian kinerja pegawai.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan realisasi kinerja perangkat daerah
- Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan kinerja
- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis keberhasilan atau kegagalan terhadap program/kegiatan perangkat daerah

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Penyusunan rencana strategis perangkat daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran lebih rinci dari perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga setiap langkah yang direncanakan dalam RENSTRA Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 selaras dengan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis membutuhkan integritas antara keterampilan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar dapat memenuhi berbagai perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat Kabupaten, Nasional maupun Internasional.

Dasar dalam penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2029 adalah visi-misi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2029. Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 – 2026, yaitu: **“BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”**

Misi yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2029 antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan Pelatihan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkompetensi dan berdaya saing.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan Kesehatan untuk mewujudkan Masyarakat yang sehat, produktif dan sejahtera.
3. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Melalui Optimalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan memperluas lapangan pekerjaan melalui penguatan UMKM berbasis Industri Unggulan.



4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mempercepat konektivitas dan mobilitas pertumbuhan ekonomi
5. Mewujudkan Penataan Kota dan Pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang, lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
6. Meningkatkan prestasi bidang seni, budaya, dan olahraga serta melestarikan warisan budaya sesuai kearifan lokal.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Melayani dan Akuntabel.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2025 - 2029, maka Sekretariat Daerah akan mendukung pelaksanaan misi ke tujuh yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Melayani dan Akuntabel**” sebagai bentuk tanggungjawab dan pelaksanaan untuk mendukung pencapaian visi RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pola pengerahan dan pengarahan seluruh sumberdaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal (*external factor*) dan internal (*internal factor*) menggunakan perangkat analisis SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Hasil analisis diperoleh dari pertautan antara faktor internal (*internal factor/ ifas*) dan eksternal (*external factor/ efas*) yang menghasilkan alternatif strategi yang mendukung strategi agresif, strategi *turn-around*, strategi strategi diversifikasi dan strategi defensif.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 6.1 berikut.



Tabel 1.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategis | Arah Kebijakan |
|--|--|---|--|
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Sekretariat Daerah | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra | Peningkatan Kualitas re-regulasi dan deregulasi Produk Hukum Daerah | Menciptakan lingkungan regulasi yang efektif, efisien dan mendukung pembangunan daerah melalui proses penyusunan dan revisi peraturan-peraturan di daerah serta penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas perangkat daerah |
| | | Peningkatan Pelayanan Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat terkait Program Kegiatan Kesejahteraan Rakyat | Fasilitasi Permohonan Bantuan Sosial dan Hibah |
| | | | Fasilitasi Pelayanan Bidang Keagamaan, Kemasyarakatan, Pemberian Bansos dan Pemberian Hibah |
| | | Peningkatan Pelayanan Hukum yang Efektif dan Efisien | Pelaksanaan Sosialisasi dan Bantuan Hukum |
| | | Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi yang Intensif dengan Pemerintah Provinsi, Pusat, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya | Pengelolaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang Baik |
| | Fasilitasi Penetapan Batas Wilayah antar Kecamatan dalam Kabupaten dan Penetapan Batas Wilayah antar Kabupaten | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan | | Memfasilitasi Upaya Kenaikan Laba Perusahaan Umum Daerah dan Peningkatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah | |



| | | | |
|---|--|---|--|
| | | Peningkatkan Pelayanan Publik terhadap Pengadaan Barang dan Jasa yang Efektif, Efisien, Transparan dan Kompetitif | Penyediaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum | | Peningkatan Fasilitas Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat | Penyediaan penyelenggaraan keprotokolan |
| | | Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Rumah Tangga, Peralatan dan Perlengkapan | Fasilitasi Ketersediaan Sarana, Perlengkapan dan Peralatan lingkup Sekretariat Daerah dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah |
| | | Pelayanan dan Penyusunan Administrasi Kepegawaian | Pelayanan dan Penyusunan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah, Pelayanan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah |
| | | | Pelayanan dan penyusunan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah |
| | | Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi antar SKPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Melaksanakan Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) |
| | | Pengelolaan Tata kelola Pemerintahan berbasis IT | Meningkatkan kompetensi SDM dalam penggunaan dan pengelolaan sistem berbasis teknologi informasi melalui pelatihan dan sertifikasi serta Memperkuat jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelayanan internal dan eksternal yang berbasis digital |

Sumber : Dokumen Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029, 120-123



C. Tujuan dan Sasaran

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran harus lebih spesifik, terukur dan memiliki indikator yang rinci untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing visi dan misi. Sasaran bisa juga diartikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria specific (sfesifik / khusus), measureable (dapat diukur), achievable (dapat dicapai), relevant (time bond, dan continously improve (SMART-C). Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2025 berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 1.5 dan 1.6



Tabel 1.5
Tujuan dan Indikator Sekretariat Daerah

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN |
|---|---|
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE Sakip |
| | Indeks Reformasi Hukum |

Sumber : Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kab.Tanah Bumbu tahun 2025-2029, 112-113

Tabel 1.6
Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|--|--|
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra | Persentase Kebijakan yang dihasilkan dari Fasilitasi dan Layanan Bidang Kesra yang Efektif |
| | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan |
| | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum | Tingkat Partisipasi Penilaian PEKPPP Mandiri |
| | Tingkat Partisipasi Survei Budaya Kerja |
| | Indeks Kematangan Organisasi |
| | Persentase Pelayanan Pimpinan Terfasilitasi |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah | Nilai SAKIP Sekretariat Daerah |
| | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Daerah |

Sumber : Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kab.Tanah Bumbu tahun 2025-2029, 112-113



Tabel 1.7
Penetapan Kinerja berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029
Sekretariat Daerah

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. | FORMULASI PERHITUNGAN | |
|---|---|--|--|--------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Sekretariat Daerah | | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE Sakip | Bobot | 10,49 | 11,23 | 12,17 | 13,11 | 14,05 | 14,99 | 15,00 | Bagian Organisasi | LHE Sakip KemenPAN-RB | |
| | | | Indeks Reformasi Hukum | Bobot Indeks | 57,4 | 60,49 | 65,48 | 70,46 | 75,44 | 80,42 | 83,20 | Bagian Hukum | Indeks Reformasi Hukum (IRH) Online Kemenkumham | |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra | Persentase Kebijakan yang dihasilkan dari Fasilitasi dan Layanan Bidang Kesra yang Efektif | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Perda, Perbup dan SK yang dilaksanakan / Jumlah Perda, Perbup dan SK terkait kebijakan bidang kesra yg diterbitkan x 100% |
| | | | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Indeks | 3,33 | 2,90 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | Bagian Pemerintahan | Penilaian dari Kemendagri |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan | Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana / Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yg dibuat x 100% |
| | | | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Bobot | 76,23 | Baik (78.01 - 82.00) | Baik (82.01 - 85.00) | Baik (85.01 - 88.00) | Baik (88.01 - 90.00) | Sangat Baik (>90.01 s/d 95.00) | Sangat Baik (95.01 s/d < 100) | Sangat Baik (95.01 s/d < 100) | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Dashboard Indeks Tata kelola Pengadaan barang dan Jasa (ITKP) Lembaga Kebijakan Pengadaan |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum | Tingkat Partisipasi Penilaian PEKPPP Mandiri | Predikat | 0 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | Bagian Organisasi | Penilaian dari KemenPAN-RB |
| | | | Tingkat Partisipasi Survei Budaya Kerja | Bobot | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | Bagian Organisasi | Penilaian dari KemenPAN-RB |
| | | | Indeks Kematangan Organisasi | Predikat | 36,34 | 36,50 | 38,50 | 40,50 | 42,50 | 44,50 | 46,00 | Bagian Organisasi | Rumusan Sesuai dengan Permendagri No. 99 Tahun 2018 |
| | | | Persentase Pelayanan Pimpinan Terfasilitasi | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Undangan dihadiri/Jumlah Total Undangan x 100% |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah | Nilai Sakip Sekretariat Daerah | Indeks | 86,75 | 86,83 | 86,95 | 87,15 | 87,65 | 88,55 | 89,35 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | LHE Sakip Inspektorat Daerah |
| | | | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Daerah | Indeks | 0 | 3,81 | 3,83 | 3,85 | 3,87 | 3,89 | 3,91 | Bagian Umum | Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Masyarakat |

Sumber : Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kab.Tanah Bumbu tahun 2025-2029, 112-113



E. Program dan Kegiatan

Program serta kegiatan memiliki fungsi sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Pada tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran renstra perangkat daerah. Berikut tabel penjelasan program/kegiatan yang mendukung dalam pencapaian rencana strategis :



Tabel 1.8

Program/Kegiatan Pendukung RPJMD Sekretariat Daerah

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Program/Kegiatan | Penanggungjawab | |
|---|--|---|--|---------------------|---|---------------------|
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Sekretariat Daerah | | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE Sakip | Bobot | | | |
| | | Indeks Reformasi Hukum | Bobot Indeks | | | |
| | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra | | Persentase Kebijakan yang dihasilkan dari Fasilitasi dan Layanan Bidang Kesra yang Efektif | Persentase | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | | | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Indeks | Administrasi Tata Pemerintahan | Bagian Pemerintahan |
| | | | | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial | Bagian Kesra |
| | | | | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Bagian Hukum |
| | | | | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Bagian Pemerintahan |
| | | | | | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Bagian Pemerintahan |
| | | | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Bagian Pemerintahan | | |
| | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan | | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | Persentase | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | |
| | | | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Bobot | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Bagian Ekonomi |
| | | | | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Bagian Ekonomi |
| | | | | | Pengelolaan Barang dan Jasa | Bagian PBJ |
| | | | | | Pemantauan Kebijakan SDA | Bagian Ekonomi |
| | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum | | Tingkat Partisipasi Penilaian PEKPPP Mandiri | Predikat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | Tingkat Partisipasi Survei Budaya Kerja | Bobot | Penataan Organisasi | Bagian Organisasi |
| | | | Indeks Kematangan Organisasi | Predikat | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Bagian Prokom |
| | | | Persentase Pelayanan Pimpinan Terfasilitasi | Persentase | | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan | | Nilai Sakip Sekretariat Daerah | Indeks | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | |



| | Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Daerah | Indeks | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
|--|--|--|--------|---|--|
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Semua Unit Kerja |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Semua Unit Kerja |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Semua Unit Kerja |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Semua Unit Kerja |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Semua Unit Kerja |
| | | | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum |
| | | | | Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah | Bagian Umum |

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan



F. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Secara garis besar, untuk mengevaluasi capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, hal ini dapat dianalisis melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai bahan analisa ditampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.9
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Tahun 2025

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Formulasi/Penjelasan | Target 2025 | Penanggungjawab |
|----|---|--|--|---|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Sekretariat Daerah | | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE Sakip | LHE Sakip KemenPAN-RB | 11,23 Bobot | Bagian Organisasi |
| | | | Indeks Reformasi Hukum | Indeks Reformasi Hukum (IRH) Online Kemenkumham | 60,49 Bobot Indeks | Bagian Hukum |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra | Persentase Kebijakan yang dihasilkan dari Fasilitasi dan Layanan Bidang Kesra yang Efektif | Perda, Perbup dan SK yang dilaksanakan / Jumlah Perda, Perbup dan SK terkait kebijakan bidang kesra yg diterbitkan x 100% | 100% | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | Nilai Laporan Penyelenggaraan | Penilaian dari Kemendagri | 2,90 Indeks | Bagian Pemerintahan |



| | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------|--|
| | | Pemerintah Daerah (LPPD) | | | |
| | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana / Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yg dibuat x 100% | 100% | Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan |
| | | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Dashboard Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa (ITKP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | Baik (78.01 - 82.00) Bobot | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum | Tingkat Partisipasi Penilaian PEKPPP Mandiri | Penilaian dari KemenPAN-RB | 3,00 Predikat | Bagian Organisasi |
| | | Tingkat Partisipasi Survei Budaya Kerja | Penilaian dari KemenPAN-RB | 17 Bobot | Bagian Organisasi |
| | | Indeks Kematangan Organisasi | Rumusan Sesuai dengan Permendagri No. 99 Tahun 2018 | 36,50 Predikat | Bagian Organisasi |
| | | Persentase Pelayanan Pimpinan Terfasilitasi | Jumlah Undangan dihadiri/Jumlah Total Undangan x 100% | 100% | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah | Nilai Sakip Sekretariat Daerah | LHE Sakip Inspektorat Daerah | 86,83 Indeks | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Daerah | Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Masyarakat | 3,81 Indeks | Bagian Umum |

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan

G. Rencana Kerja

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional daripada RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), komponen-komponen yang terkandung dalam renstra seperti visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang bersifat umum dan target-target yang hendak dicapai harus dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), kemudian dikaitkan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan dijabarkan kedalam usulan kegiatan-kegiatan teknis dan kegiatan-kegiatan administrasi umum.

Sesuai dengan rencana kinerja Sekretariat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan yang memiliki beberapa indikator



kinerja. Indikator kinerja hanya dapat diukur jika dalam tahun berjalan terdapat kegiatan yang mengarah pada pencapaian kinerja. Agar dapat diukur, terlebih dahulu harus ditetapkan target indikator sasaran yang akan dicapai, dan selanjutnya disajikan kedalam Rencana Kinerja Tahunan. Hasil pengukuran indikator inilah yang akan menggambarkan kegagalan atau keberhasilan suatu instansi.

Untuk Tahun 2025 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah diuraikan dalam target indikator – indikator kinerja yang hendak dicapai. Demikian pula terhadap kegiatan, target kinerja dirinci menjadi indikator masukan, keluaran dan hasil kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.9 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kerja Tahun 2025
Sekretariat Daerah

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja/Kegiatan | Target | Anggaran |
|---|--|--------|-------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah | 100 | 25,973,046,216.49 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 204,906,536.00 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | 52,338,913.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 | 43,567,623.00 |
| Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | | 55,000,000.00 |



| | | | |
|---|--|------------|--------------------------|
| Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | | 54,000,000.00 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik | 100 | 22,221,420,708.03 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB) | 120 | 21,107,295,644.88 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 1 | 1,074,747,428.15 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 39,377,635.00 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah | 100 | 9,300,000.00 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 29 | 9,300,000.00 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 522,955,224.00 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 88,600,677 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | 25,854,675 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 1 | 408,499,872 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 42,154,259.39 |



| | | | |
|---|---|------------|--------------------------|
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 14,135,220 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | 28,019,039 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang Terpelihara dengan Baik | 100 | 46,977,645.00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 7 | 46,977,645 |
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepat waktu | 100 | 2,925,331,844.07 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (OB) | 24 | 2,126,731,844 |
| Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (OB) | 120 | 798,600,000 |
| Jumlah | | | 25,973,046,216.49 |



H. Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah, untuk tahun Anggaran 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan 3 Program, 18 Kegiatan dan 58 sub kegiatan. Program dan kegiatan dapat diwujudkan melalui target sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 melalui target sasaran tersebut ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara perangkat daerah dengan kepala daerah. Berikut perjanjian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2025

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target tahun 2025 | Anggaran |
|-----|--|--|----------------------|----------|
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Sekretariat Daerah | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE Sakip | 11,23 Bobot | |
| | | Indeks Reformasi Hukum | 60,49 Bobot Indeks | |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra | Persentase Kebijakan yang dihasilkan dari Fasilitasi dan Layanan Bidang Kesra yang Efektif | 100% | |
| | | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2,90 | |
| 3 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | 100% | |
| | | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Baik (78.01 - 82.00) | |
| 4 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum | Tingkat Partisipasi Penilaian PEKPPP Mandiri | 3,00 | |
| | | Tingkat Partisipasi Survei Budaya Kerja | 17 | |
| | | Indeks Kematangan Organisasi | 36,50 | |
| | | Persentase Pelayanan Pimpinan Terfasilitasi | 100% | |
| 5 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah | Nilai Sakip Sekretariat Daerah | 86,83 | |
| | | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Daerah | 2,50 | |



Tabel 2.3
Anggaran program/kegiatan dan sub kegiatan dalam perjanjian kinerja
Sekretariat Daerah Tahun 2025

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Pagu (Rp) | |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Pergeseran |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 76.651.625.147,00 | 96.516.045.233,00 |
| 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 313.493.200,00 | 281.629.900,00 |
| 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 87.919.100,00 | 87.919.100,00 |
| 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 82.908.700,00 | 51.045.400,00 |
| 4.01.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 70.013.900,00 | 70.013.900,00 |
| 4.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | 72.651.500,00 | 72.651.500,00 |
| 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 28.864.561.498,00 | 31.908.064.284,00 |
| 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 23.129.051.366,00 | 25.822.630.440,00 |
| 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5.684.464.732,00 | 6.002.525.144,00 |
| 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 51.045.400,00 | 82.908.700,00 |
| 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 897.678.700,00 | 1.172.678.700,00 |
| 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 897.678.700,00 | 1.172.678.700,00 |
| 4.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 22.803.560.670,00 | 37.561.965.170,00 |
| 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.219.300,00 | 1.219.300,00 |
| 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.469.246.670,00 | 24.064.101.170,00 |
| 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 190.890.900,00 | 182.023.800,00 |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 605.065.400,00 | 666.234.900,00 |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.207.090.000,00 | 9.709.880.000,00 |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6.330.048.400,00 | 2.938.506.000,00 |
| 4.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.356.494.302,00 | 6.847.569.202,00 |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.345.990.000,00 | 2.345.990.000,00 |
| 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 87.990.000,00 | 87.990.000,00 |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4.922.514.302,00 | 4.413.589.202,00 |
| 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6.411.502.500,00 | 7.912.162.500,00 |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49.712.000,00 | 151.886.000,00 |
| 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.501.810.500,00 | 2.673.896.500,00 |
| 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.000.000,00 | 4.500.000,00 |
| 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3.214.490.000,00 | 4.442.390.000,00 |
| 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 639.490.000,00 | 639.490.000,00 |
| 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 3.905.853.327,00 | 4.318.353.327,00 |
| 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 3.264.163.327,00 | 3.676.663.327,00 |
| 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 621.690.000,00 | 621.690.000,00 |
| 4.01.01.2.12 | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 3.056.770.000,00 | 3.836.770.000,00 |
| 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 593.490.000,00 | 613.490.000,00 |
| 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 516.090.000,00 | 436.090.000,00 |
| 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 1.947.190.000,00 | 2.787.190.000,00 |
| 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | 2.050.362.550,00 | 1.301.222.750,00 |
| 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 748.022.100,00 | 478.975.500,00 |
| 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 540.722.300,00 | 282.305.000,00 |
| 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 693.006.950,00 | 482.326.250,00 |
| 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 30.831.200,00 | 19.836.000,00 |
| 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 37.780.000,00 | 37.780.000,00 |



| | | | |
|---------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 991.348.400,00 | 1.375.629.400,00 |
| 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | 405.066.400,00 | 756.459.400,00 |
| 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 331.921.000,00 | 379.847.000,00 |
| 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 254.361.000,00 | 239.323.000,00 |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 165.653.473.696,00 | 78.126.216.654,00 |
| 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | 2.331.805.282,00 | 1.885.631.712,00 |
| 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 1.624.389.088,00 | 1.339.911.194,00 |
| 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 707.416.194,00 | 545.720.518,00 |
| 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 161.361.846.714,00 | 74.481.108.642,00 |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 39.748.106.000,00 | 38.817.581.000,00 |
| 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 492.896.800,00 | 2.363.286.800,00 |
| 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 121.120.843.914,00 | 33.300.240.842,00 |
| 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 1.746.867.700,00 | 1.564.512.300,00 |
| 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 869.288.200,00 | 757.874.100,00 |
| 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 517.107.900,00 | 497.710.100,00 |
| 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 360.471.600,00 | 308.928.100,00 |
| 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | 212.954.000,00 | 194.964.000,00 |
| 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 195.634.000,00 | 177.644.000,00 |
| 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 17.320.000,00 | 17.320.000,00 |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1.587.607.000,00 | 1.274.845.000,00 |
| 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 246.300.200,00 | 175.150.200,00 |
| 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 162.355.200,00 | 77.005.200,00 |
| 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 66.870.000,00 | 81.070.000,00 |
| 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | 17.075.000,00 | 17.075.000,00 |
| 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 158.166.000,00 | 79.284.000,00 |
| 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 142.836.000,00 | 63.954.000,00 |
| 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 15.330.000,00 | 15.330.000,00 |
| 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1.051.470.800,00 | 933.540.800,00 |
| 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 97.860.000,00 | 51.360.000,00 |



| | | | |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|
| 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | 302.590.000,00 | 236.090.000,00 |
| 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 651.020.800,00 | 646.090.800,00 |
| 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 131.670.000,00 | 86.870.000,00 |
| 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 112.880.000,00 | 68.080.000,00 |
| 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 18.790.000,00 | 18.790.000,00 |
| | | 243.892.705.843 | 175.917.106.887 |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Definisi Akuntabilitas Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja dengan mempergunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) atau Indikator Hasil (Outcome) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya yang menggambarkan kewenangan tugas dan fungsi serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.



- a. IKU pada tingkat Eselon II adalah Indikator Hasil (Outcome) atau keluaran (Output) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi;
- b. IKU pada tingkat Eselon I adalah Indikator hasil (Outcome) dan atau keluaran (Output), setingkat lebih tinggi dari keluaran (Output) unit kerja dibawahnya;
- c. IKU pada tingkat Eselon II sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output);

B. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder. Pengukuran kinerja mencakup, kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja. Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$



C. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program.

Penilaian Capaian Kinerja Untuk Setiap Indikator Kinerja Sasaran sesuai Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010, Menggunakan Interpretasi Penilaian Dengan Pengukuran skala Original Yaitu.

Tabel 2.4
Pengukuran Skala Capaian

| <i>Skala</i> | <i>Predikat/kategori</i> |
|-------------------------|--------------------------|
| <i>Lebih dari 90 %</i> | Sangat Berhasil |
| <i>81 % s.d 90 %</i> | Baik (Berhasil) |
| <i>61 % s.d 80 %</i> | Cukup Berhasil |
| <i>Kurang dari 60 %</i> | Kurang Berhasil |

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Hasil pengukuran kinerja beserta analisis capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu disajikan sebagai berikut :



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan II (Tabel 2.4);
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Tabel 2.5);
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra organisasi (Tabel 2.6);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (Tabel 2.8)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya (Tabel 2.9)
7. Analisis program kegiatan/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Tabel 2.10)

Tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah mengalami perubahan dengan mengacu visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025 – 2030 berdasarkan dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2029, sehingga dalam melakukan perbandingan dari tahun sebelumnya dari beberapa sasaran kinerja perangkat daerah masih belum bisa mendapatkan hasil perbandingan terhadap Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah.



- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Tabel 2.5
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

| Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Target 2025 | Realisasi Triwulan II tahun 2025 | Persentase (%) | Keterangan |
|--|--|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------|------------|
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Sekretariat Daerah | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE Sakip | Bobot | 11,23 | | | |
| | Indeks Reformasi Hukum | Bobot Indeks | 60,49 | | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra | Persentase Kebijakan yang dihasilkan dari Fasilitasi dan Layanan Bidang Kesra yang Efektif | Persentase | 100% | | | |
| | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Indeks | 2,90 | | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | Persentase | 100% | | | |
| | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Bobot | Baik (78.01 - 82.00) | | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum | Tingkat Partisipasi Penilaian PEKPPP Mandiri | Predikat | 3,00 | | | |
| | Tingkat Partisipasi Survei Budaya Kerja | Bobot | 17 | | | |
| | Indeks Kematangan Organisasi | Predikat | 36,50 | | | |
| | Persentase Pelayanan Pimpinan Terfasilitasi | Persentase | 100% | | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah | Nilai Sakip Sekretariat Daerah | Indeks | 86,83 | | | |
| | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Daerah | Indeks | 3,81 | | | |
| | | | | | | |



- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 2.6
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan II dengan beberapa tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Realisasi Triwulan II tahun 2025 | | | Ket |
|--|--|--------------|----------------------------------|------|------|-----|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Sekretariat Daerah | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE Sakip | Bobot | | | | |
| | Indeks Reformasi Hukum | Bobot Indeks | | | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra | Persentase Kebijakan yang dihasilkan dari Fasilitasi dan Layanan Bidang Kesra yang Efektif | Persentase | | | | |
| | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Indeks | | | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | Persentase | | | | |
| | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Bobot | | | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum | Tingkat Partisipasi Penilaian PEKPPP Mandiri | Predikat | | | | |
| | Tingkat Partisipasi Survei Budaya Kerja | Bobot | | | | |
| | Indeks Kematangan Organisasi | Predikat | | | | |
| | Persentase Pelayanan Pimpinan Terasilitasi | Persentase | | | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah | Nilai Sakip Sekretariat Daerah | Indeks | | | | |
| | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Daerah | Indeks | | | | |



- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra organisasi

Tabel 2.7
Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan II dengan target jangka menengah (Renstra)

| Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Target Renstra | Realisasi Triwulan II | Ket |
|--|--|--------------|----------------------|-----------------------|-----|
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Sekretariat Daerah | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE Sakip | Bobot | 11,23 | | |
| | Indeks Reformasi Hukum | Bobot Indeks | 60,49 | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra | Persentase Kebijakan yang dihasilkan dari Fasilitasi dan Layanan Bidang Kesra yang Efektif | Persentase | 100% | | |
| | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Indeks | 2,90 | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | Persentase | 100% | | |
| | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Bobot | Baik (78.01 - 82.00) | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum | Tingkat Partisipasi Penilaian PEKPPP Mandiri | Predikat | 3,00 | | |
| | Tingkat Partisipasi Survei Budaya Kerja | Bobot | 17 | | |
| | Indeks Kematangan Organisasi | Predikat | 36,50 | | |
| | Persentase Pelayanan Pimpinan Terfasilitasi | Persentase | 100% | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah | Nilai Sakip Sekretariat Daerah | Indeks | 86,83 | | |
| | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Daerah | Indeks | 3,81 | | |
| | | | | | |



Tabel diatas menjelaskan tingkat kinerja sekretariat daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan 1 tujuan, 4 sasaran, dan 12 indikator kinerja. Terdapat perbedaan jumlah indikator kinerja yaitu tahun 2024 terdapat 1 tujuan, 2 sasaran, dan 3 indikator kinerja indikator. Penambahan indikator kinerja tersebut yaitu :

- 1) Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE Sakip (indikator baru tahun 2025 pada bagian Organisasi)
- 2) Indeks Reformasi Hukum (indikator baru tahun 2025 pada Bagian Hukum)
- 3) Persentase Kebijakan yang dihasilkan dari Fasilitasi dan Layanan Bidang Kesra yang Efektif (indikator baru tahun 2025 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat)
- 4) Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (indikator baru tahun 2025 pada Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan)
- 5) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa indikator baru tahun 2025 pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
- 6) Tingkat Partisipasi Penilaian PEKPPP Mandiri (indikator baru tahun 2025 pada Bagian Organisasi)
- 7) Tingkat Partisipasi Survei Budaya Kerja (indikator baru tahun 2025 pada Bagian Organisasi)
- 8) Indeks Kematangan Organisasi (indikator baru tahun 2025 pada Bagian Organisasi)
- 9) Persentase Pelayanan Pimpinan Terfasilitasi (indikator baru tahun 2025 pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)
- 10) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Daerah (indikator baru tahun 2025 pada Bagian Umum)

Berdasarkan pencapaian realisasi atas target yang telah diperjanjikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu serta mengacu pada realisasi anggaran triwulan II Tahun 2025 untuk mendorong indikator tersebut dapat dijabarkan pencapaiannya sebagai berikut :



Tabel 2.8
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
Triwulan II tahun 2025

| Sasaran | Program/Kegiatan | Anggaran Target TW II | Realisasi | |
|--|---|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | Fisik | Keuangan |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 39.063.108.327,00 | 10,64% | 8.310.648.219,00 |
| | Administrasi Tata Pemerintahan | 942.815.856,00 | 44,43% | 837.827.289,00 |
| | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 37.240.554.321,00 | 9,44% | 7.030.386.050,00 |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 782.256.150,00 | 27,74% | 433.984.880,00 |
| | Fasilitasi Kerjasama Daerah | 97.482.000,00 | 4,33% | 8.450.000,00 |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 637.422.500,00 | 27,65% | 352.531.100,00 |
| | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 87.575.100,00 | 29,58% | 51.801.100,00 |
| | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 39.642.000,00 | 53,95% | 42.770.000,00 |
| | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 466.770.400,00 | 22,50% | 210.011.200,00 |
| | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 43.435.000,00 | 55,20% | 47.948.800,00 |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 48.258.022.616,50 | 43,86% | 42.328.253.658,00 |
| | Penataan Organisasi | 650.611.375,00 | 27,98% | 364.141.951,00 |
| | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 687.814.700,00 | 26,97% | 370.967.808,00 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 140.814.950,00 | 12,64% | 35.590.471,00 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 15.954.032.142,00 | 40,32% | 12.866.442.864,00 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 586.339.350,00 | 73,87% | 866.224.000,00 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 18.780.982.585,00 | 50,17% | 18.843.792.518,00 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.423.784.601,00 | 38,18% | 2.614.535.356,00 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.956.081.250,00 | 31,11% | 2.461.786.719,00 |
| | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2.159.176.663,50 | 37,37% | 1.613.865.971,00 |
| | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 1.918.385.000,00 | 59,71% | 2.290.906.000,00 |



d) Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional

Tabel 2.9
Perbandingan antara
Sekretariat Daerah Kab. Tanah Bumbu dengan Sekretariat Daerah
Kota Banjar

Berikut perbandingan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja untuk tahun anggaran 2024 :

Sekretariat Daerah Kota Banjar

| Sasaran | Indikator | Realisasi tahun 2024 |
|--|---|----------------------|
| Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pemantauan Program di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Hukum | Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Sedang (3,30) |
| Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi serta Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah | Nilai SAKIP Sekretariat Daerah | BB (71,14) |
| | Nilai SKM Sekretariat Daerah | B (81,17) |

Sumber data : <https://banjarkota.go.id/wp-content/uploads/2025/05/banjarkota.go.id-lkip-2024-setda-tahun-2025.pdf>

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

| Tujuan/Sasaran | Indikator | Realisasi tahun 2024 |
|--|--|----------------------|
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | - |
| Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi serta Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah | Nilai SAKIP Sekretariat Daerah | A (86,75) |
| | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Daerah | 84.01 % |

Perbandingan diatas sebagai tolak ukur perbaikan dan peningkatan berdasarkan sasaran kinerja terkait meningkatnya tata kelola dan kualitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi serta Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu penilaian yang dilakukan secara internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui aplikasi e-SAKIP.



- e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian indikator kinerja utama tidak terlepas dari faktor pendorong dan penghambat yang harus dihadapi yang dijelaskan sebagai berikut :

- Faktor pendorong pencapaian kinerja
 - Pemanfaatan teknologi informasi guna memaksimalkan Monitoring dan Evaluasi pada seluruh bagian dari beberapa Sistem Aplikasi Perangkat Daerah.
 - Terjalinnnya koordinasi yang baik antar bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dikoordinasikan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam hal target kinerja, realisasi capaian kinerja dan anggaran serta monitoring evaluasi sesuai yang telah ditetapkan dalam Renja serta pengawasan target dan realisasi anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan.
 - Tersusunnya tata hubungan kerja yang sesuai tugas dan fungsi.
 - Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi.
- Faktor penghambat pencapaian kinerja
 - Terkendalanya serapan anggaran sub kegiatan dikarenakan adanya Batasan pagu uang persediaan untuk pencairan setiap bulannya sehingga tidak mampu untuk dapat mengakomodir semua kebutuhan pencairan anggaran Program/Kegiatan setiap anggaran.
 - Kompetensi dan kapasitas aparatur belum merata.



- Keterbatasan fasilitas kerja (teknologi, kantor, peralatan) dan Infrastruktur pendukung belum memadai.
- Belum adanya pemberian *reward and punishment* pegawai.
- Upaya Tindak Lanjut yang Dilakukan untuk Meningkatkan Indikator yang Belum Memenuhi Target
 - Akan dilakukan perbaikan atas kelangsungan koordinasi dengan bagian-bagian pada Sekretariat Daerah dalam proses pemantauan target kinerja dan realisasi capaian Program/Kegiatan.
 - Tetap mematuhi proses perencanaan sesuai dengan KAK yang telah dibuat.
 - Melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan harus memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Anggaran Kas yang telah disusun sehingga penyerapan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan dengan tepat waktu
 - Memberikan pelatihan, bimbingan teknis, atau workshop untuk dapat meningkatkan kualitas dalam perencanaan dan pelaporan kinerja.



f) Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Tabel 3.1
Efisiensi Pengguna Sumber Daya
Triwulan II 2025

| Sasaran | Program/Kegiatan | Anggaran Target TW II | Realisasi Anggaran Target TW II | Persentase Capaian Kinerja | Persentase Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|--|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 39.063.108.327,00 | 8.310.648.219,00 | 50% | 10,64% | 39,36 |
| | Administrasi Tata Pemerintahan | 942.815.856,00 | 837.827.289,00 | 50% | 44,43% | |
| | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 37.240.554.321,00 | 7.030.386.050,00 | 50% | 9,44% | |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 782.256.150,00 | 433.984.880,00 | 50% | 27,74% | |
| | Fasilitasi Kerjasama Daerah | 97.482.000,00 | 8.450.000,00 | 50% | 4,33% | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 637.422.500,00 | 352.531.100,00 | 50% | 27,65% | 22,35 |
| | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 87.575.100,00 | 51.801.100,00 | 50% | 29,58% | |
| | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 39.642.000,00 | 42.770.000,00 | 50% | 53,95% | |
| | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 466.770.400,00 | 210.011.200,00 | 50% | 22,50% | |
| | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 43.435.000,00 | 47.948.800,00 | 50% | 55,20% | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 48.258.022.616,50 | 42.328.253.658,00 | 50% | 43,86% | 6,14 |
| | Penataan Organisasi | 650.611.375,00 | 364.141.951,00 | 50% | 27,98% | |
| | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 687.814.700,00 | 370.967.808,00 | 50% | 26,97% | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 140.814.950,00 | 35.590.471,00 | 50% | 12,64% | 6,14 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 15.954.032.142,00 | 12.866.442.864,00 | 50% | 40,32% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 586.339.350,00 | 866.224.000,00 | 50% | 73,87% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 18.780.982.585,00 | 18.843.792.518,00 | 50% | 50,17% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.423.784.601,00 | 2.614.535.356,00 | 50% | 38,18% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.956.081.250,00 | 2.461.786.719,00 | 50% | 31,11% | |
| | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2.159.176.663,50 | 1.613.865.971,00 | 50% | 37,37% | |
| | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 1.918.385.000,00 | 2.290.906.000,00 | 50% | 59,71% | |



Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan kegiatan melalui APBD sebelum perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 243.892.705.843. Melalui mekanisme Pergeseran Tahun 2024 jumlah anggaran menjadi Rp. 175.917.106.887. Berdasarkan tabel diatas dapat dihasilkan rata-rata penyerapan anggaran pada triwulan II tahun 2025 sebesar : 28,99%, rata-rata capaian kinerja sebesar : 28,99 % dan rata-rata tingkat efisiensi sebesar : 22,61%

Berikut dijabarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan 3 Program yang diampu oleh Sekretariat Daerah Kota Banjar, yaitu :

| | |
|---|---|
| Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Untuk mendorong sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk triwulan II tahun 2025 menunjukkan penyerapan anggaran sebesar 10,64%. Hal tersebut menyebabkan efisiensi anggaran 39,36% yang menandakan penggunaan sumber daya yang efektif dengan output maksimal meski dengan anggaran yang lebih hemat. |
|---|---|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Program Perekonomian dan Pembangunan | Untuk mendorong sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan Program Perekonomian dan Pembangunan untuk triwulan II tahun 2025 menunjukkan penyerapan anggaran sebesar 27,65%. Hal tersebut menyebabkan efisiensi anggaran 22,35% yang menandakan penggunaan sumber |
|--------------------------------------|---|

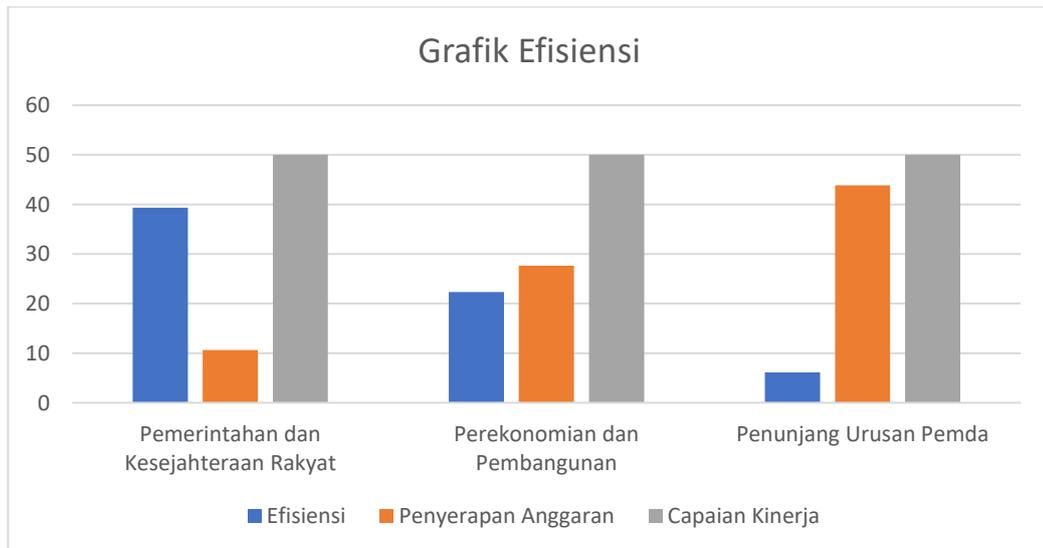


daya yang efektif dengan output maksimal meski dengan anggaran yang lebih hemat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk mendorong sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum serta Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk triwulan II tahun 2025 menunjukkan penyerapan anggaran sebesar 43,86%. Hal tersebut menyebabkan efisiensi anggaran 6,14% yang mengindikasikan bahwa meskipun target tercapai, masih terdapat potensi untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

Grafik 1.4
Efisiensi pengguna sumber daya
Sekretariat Daerah



Berdasarkan grafik diatas menggambarkan Penyerapan Anggaran pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menunjukkan efisiensi anggaran yang cukup tinggi, sedangkan untuk Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyerap anggaran paling besar pada triwulan II tahun 2025.

g) Analisis program kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Tabel 2.10)

**PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan

Sub Kegiatan :Penataan Administrasi Pemerintahan

Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Sub Kegiatan :Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Sosial

Sub Kegiatan :Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum

Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan
Informasi Hukum

Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama



**PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN**

Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan : Pengelolaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan : Pemantauan Kebijakan SDA

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Penataan Organisasi

Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan



Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah



D. Rekomendasi dan Tindaklanjut

Berdasarkan evaluasi dari tim internal Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah mendapatkan Rekomendasi perbaikan dari aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja Internal. Berikut disampaikan rekomendasi dan rencana tindaklanjut dan perbaikan tahun anggaran 2024 :

Perencanaan Kinerja

Rekomendasi

- Anggaran yang ditetapkan agar mengacu pada kinerja yang ingin dicapai dengan melakukan rapat pembahasan anggaran antara eselon II dan bawahannya, serta mendokumentasikan absensi, notulen, dan foto kegiatan.

Tindaklanjut

- Akan dilakukan konsolidasi internal guna memastikan pembahasan anggaran antara eselon II dan bawahannya terlaksana.

Rekomendasi

- Aktivitas yang dilaksanakan agar mendukung kinerja yang ingin dicapai dengan melakukan rapat pembahasan renja antara eselon II dan bawahannya, serta mendokumentasikan absensi, notulen, dan foto kegiatan

Tindaklanjut

- Akan dilakukan konsolidasi internal guna memastikan pembahasan renja antara eselon II dan bawahannya terlaksana.

Rekomendasi

- Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja agar diusahakan tercapai dengan baik, dengan melakukan rapat pembahasan renja antara Eselon II dan bawahannya, serta mendokumentasikan absensi, notulen, dan foto kegiatan.

Tindaklanjut



- Akan dilakukan konsolidasi internal guna memastikan target dalam perencanaan kinerja tercapai dengan baik.

Rekomendasi

- Rencana aksi kinerja agar selalu dipantau secara berkala, dengan melakukan rapat pembahasan laporan rencana kinerja triwulan antara eselon II dan bawahannya, dengan mendokumentasikan absensi, notulen, dan foto kegiatan.

Tindaklanjut

- Akan dilakukan konsolidasi internal guna memastikan Rencana aksi kinerja dapat terpantau secara berkala.

Rekomendasi

- Dilakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dengan melakukan rapat pembahasan perubahan dokumen perencanaan kinerja antara eselon II dan bawahannya serta mendokumentasikan absensi, notulen, dan foto kegiatan.

Tindaklanjut

- Akan dilakukan konsolidasi internal guna memastikan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

Pengukuran Kinerja

Rekomendasi

- Melakukan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan struktural maupun fungsional.

Tindaklanjut

- Akan dilakukan konsolidasi internal guna memastikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan struktural maupun fungsional.

Rekomendasi

- Melakukan tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kinerja rencana aksi yang sudah dibuat.

Tindaklanjut



- Telah dilakukan koordinasi lanjutan untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi kinerja rencana aksi yang sudah dibuat.

Pelaporan Kinerja

Rekomendasi

- Laporan kinerja agar disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dengan menguraikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada BAB III.

Tindaklanjut

- Telah dilakukan koordinasi lanjutan untuk menindaklanjuti Laporan kinerja dengan menguraikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada BAB III.

Rekomendasi

- Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) pada BAB IV.

Tindaklanjut

- Telah dilakukan koordinasi lanjutan untuk menindaklanjuti Rekomendasi perbaikan kinerja pada BAB IV.

Rekomendasi

- Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dengan melakukan rapat, hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen rapat terkait laporan berkala triwulan I s.d III atas capaian rencana aksi.

Tindaklanjut

- Telah dilakukan koordinasi lanjutan untuk menindaklanjuti Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja triwulan I s.d III atas capaian rencana aksi.



Akuntabilitas Kinerja Internal

Rekomendasi

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan mendokumentasikan bukti memorandum, disposisi pimpinan kepada tim evaluasi internal sebagai bentuk koordinasi.

Tindaklanjut

- Sebagai upaya perbaikan dan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal koordinasi dengan berbagai pihak akan ditingkatkan.

E. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pencapaian atau penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah dibelanjakan atau digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Untuk realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu triwulan II tahun 2025 dengan pagu anggaran pergeseran sebesar Rp. 175.917.106.887 dengan target anggaran triwulan II sebesar Rp. 87.958.553.444 dan telah terealisasikan sebesar Rp. 50.991.432.977 atau 28,99%. Berikut tabel realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk triwulan II tahun 2025.



Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah
Triwulan II tahun 2025

| Program/Kegiatan | Pagu (Rp) | | Target s.d Tw II | | Realisasi | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------|--------------------------|---------------|
| | Sebelum Perubahan | Setelah Pergeseran | Fisik | Keuangan | Fisik (%) | Fisik TTB (%) | Bobot | Keuangan | |
| | | | (%) | (Rp) | | | | Rp | % |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 76.651.625.147,00 | 96.516.045.233,00 | 50,00% | 48.258.022.616,50 | 43,86% | | | 42.328.253.658,00 | 43,86% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 313.493.200,00 | 281.629.900,00 | 50,00% | 140.814.950,00 | 12,64% | | | 35.590.471,00 | 12,64% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 87.919.100,00 | 87.919.100,00 | 50,00% | 43.959.550,00 | 10,46% | 0,01% | 0% | 9.196.572,00 | 10,46% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 82.908.700,00 | 51.045.400,00 | 50,00% | 25.522.700,00 | 5,97% | 0,00% | 0% | 3.048.144,00 | 5,97% |
| Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 70.013.900,00 | 70.013.900,00 | 50,00% | 35.006.950,00 | 24,37% | 0,01% | 0% | 17.060.918,00 | 24,37% |
| Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | 72.651.500,00 | 72.651.500,00 | 50,00% | 36.325.750,00 | 8,65% | 0,00% | 0% | 6.284.837,00 | 8,65% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 28.864.561.498,00 | 31.908.064.284,00 | 50,00% | 15.954.032.142,00 | 40,32% | | | 12.866.442.864,00 | 40,32% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 23.129.051.366,00 | 25.822.630.440,00 | 50,00% | 12.911.315.220,00 | 43,43% | 6,38% | 15% | 11.215.701.981,00 | 43,43% |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5.684.464.732,00 | 6.002.525.144,00 | 50,00% | 3.001.262.572,00 | 26,95% | 0,92% | 3% | 1.617.840.061,00 | 26,95% |



| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------|-----|--------------------------|---------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 51.045.400,00 | 82.908.700,00 | 50,00% | 41.454.350,00 | 39,68% | 0,02% | 0% | 32.900.822,00 | 39,68% |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 897.678.700,00 | 1.172.678.700,00 | 50,00% | 586.339.350,00 | 73,87% | | | 866.224.000,00 | 73,87% |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 897.678.700,00 | 1.172.678.700,00 | 50,00% | 586.339.350,00 | 73,87% | 0,49% | 1% | 866.224.000,00 | 73,87% |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0% | 0,00 | 0,00% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 22.803.560.670,00 | 37.561.965.170,00 | 50,00% | 18.780.982.585,00 | 50,17% | | | 18.843.792.518,00 | 50,17% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.219.300,00 | 1.219.300,00 | 50,00% | 609.650,00 | 0,00% | 0,00% | 0% | 0,00 | 0,00% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.469.246.670,00 | 24.064.101.170,00 | 50,00% | 12.032.050.585,00 | 45,39% | 6,21% | 14% | 10.923.377.344,00 | 45,39% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 190.890.900,00 | 182.023.800,00 | 50,00% | 91.011.900,00 | 11,12% | 0,01% | 0% | 20.233.100,00 | 11,12% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 605.065.400,00 | 666.234.900,00 | 50,00% | 333.117.450,00 | 23,66% | 0,09% | 0% | 157.603.900,00 | 23,66% |
| Fasilitas Kunjungan Tamu | 3.207.090.000,00 | 9.709.880.000,00 | 50,00% | 4.854.940.000,00 | 67,09% | 3,70% | 6% | 6.514.206.412,00 | 67,09% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6.330.048.400,00 | 2.938.506.000,00 | 50,00% | 1.469.253.000,00 | 41,80% | 0,70% | 2% | 1.228.371.762,00 | 41,80% |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0% | 0,00 | 0,00% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.356.494.302,00 | 6.847.569.202,00 | 50,00% | 3.423.784.601,00 | 38,18% | | | 2.614.535.356,00 | 38,18% |



| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------|----|-------------------------|---------------|
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.345.990.000,00 | 2.345.990.000,00 | 50,00% | 1.172.995.000,00 | 29,12% | 0,39% | 1% | 683.268.190,00 | 29,12% |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 87.990.000,00 | 87.990.000,00 | 50,00% | 43.995.000,00 | 16,54% | 0,01% | 0% | 14.550.000,00 | 16,54% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4.922.514.302,00 | 4.413.589.202,00 | 50,00% | 2.206.794.601,00 | 43,43% | 1,09% | 3% | 1.916.717.166,00 | 43,43% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6.411.502.500,00 | 7.912.162.500,00 | 50,00% | 3.956.081.250,00 | 31,11% | | | 2.461.786.719,00 | 31,11% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49.712.000,00 | 151.886.000,00 | 50,00% | 75.943.000,00 | 5,24% | 0,00% | 0% | 7.952.000,00 | 5,24% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.501.810.500,00 | 2.673.896.500,00 | 50,00% | 1.336.948.250,00 | 33,49% | 0,51% | 2% | 895.545.000,00 | 33,49% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.000.000,00 | 4.500.000,00 | 50,00% | 2.250.000,00 | 0,00% | 0,00% | 0% | 0,00 | 0,00% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3.214.490.000,00 | 4.442.390.000,00 | 50,00% | 2.221.195.000,00 | 30,00% | 0,76% | 3% | 1.332.828.719,00 | 30,00% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 639.490.000,00 | 639.490.000,00 | 50,00% | 319.745.000,00 | 35,26% | 0,13% | 0% | 225.461.000,00 | 35,26% |
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 3.905.853.327,00 | 4.318.353.327,00 | 50,00% | 2.159.176.663,50 | 37,37% | | | 1.613.865.971,00 | 37,37% |



| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------|----|-------------------------|---------------|
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 3.264.163.327,00 | 3.676.663.327,00 | 50,00% | 1.838.331.663,50 | 33,96% | 0,71% | 2% | 1.248.735.971,00 | 33,96% |
| Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 50,00% | 10.000.000,00 | 0,00% | 0,00% | 0% | 0,00 | 0,00% |
| Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 621.690.000,00 | 621.690.000,00 | 50,00% | 310.845.000,00 | 58,73% | 0,21% | 0% | 365.130.000,00 | 58,73% |
| Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 3.056.770.000,00 | 3.836.770.000,00 | 50,00% | 1.918.385.000,00 | 59,71% | | | 2.290.906.000,00 | 59,71% |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 593.490.000,00 | 613.490.000,00 | 50,00% | 306.745.000,00 | 69,24% | 0,24% | 0% | 424.796.000,00 | 69,24% |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 516.090.000,00 | 436.090.000,00 | 50,00% | 218.045.000,00 | 51,85% | 0,13% | 0% | 226.110.000,00 | 51,85% |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 1.947.190.000,00 | 2.787.190.000,00 | 50,00% | 1.393.595.000,00 | 58,84% | 0,93% | 2% | 1.640.000.000,00 | 58,84% |
| Penataan Organisasi | 2.050.362.550,00 | 1.301.222.750,00 | 50,00% | 650.611.375,00 | 27,98% | | | 364.141.951,00 | 27,98% |
| Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 748.022.100,00 | 478.975.500,00 | 50,00% | 239.487.750,00 | 17,44% | 0,05% | 0% | 83.519.600,00 | 17,44% |
| Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 540.722.300,00 | 282.305.000,00 | 50,00% | 141.152.500,00 | 29,42% | 0,05% | 0% | 83.044.829,00 | 29,42% |
| Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 693.006.950,00 | 482.326.250,00 | 50,00% | 241.163.125,00 | 35,44% | 0,10% | 0% | 170.912.522,00 | 35,44% |
| Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 30.831.200,00 | 19.836.000,00 | 50,00% | 9.918.000,00 | 89,08% | 0,01% | 0% | 17.670.000,00 | 89,08% |



| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------|-----|-------------------------|---------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 37.780.000,00 | 37.780.000,00 | 50,00% | 18.890.000,00 | 23,81% | 0,01% | 0% | 8.995.000,00 | 23,81% |
| Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 991.348.400,00 | 1.375.629.400,00 | 50,00% | 687.814.700,00 | 26,97% | | | 370.967.808,00 | 26,97% |
| Fasilitasi Keprotokolan | 405.066.400,00 | 756.459.400,00 | 50,00% | 378.229.700,00 | 20,97% | 0,09% | 0% | 158.607.378,00 | 20,97% |
| Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 331.921.000,00 | 379.847.000,00 | 50,00% | 189.923.500,00 | 35,26% | 0,08% | 0% | 133.940.430,00 | 35,26% |
| Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 254.361.000,00 | 239.323.000,00 | 50,00% | 119.661.500,00 | 32,77% | 0,04% | 0% | 78.420.000,00 | 32,77% |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 165.653.473.696,00 | 78.126.216.654,00 | 50,00% | 39.063.108.327,00 | 10,64% | | | 8.310.648.219,00 | 10,64% |
| Administrasi Tata Pemerintahan | 2.331.805.282,00 | 1.885.631.712,00 | 50,00% | 942.815.856,00 | 44,43% | | | 837.827.289,00 | 44,43% |
| Penataan Administrasi Pemerintahan | 1.624.389.088,00 | 1.339.911.194,00 | 50,00% | 669.955.597,00 | 55,03% | 0,42% | 1% | 737.415.452,00 | 55,03% |
| Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 707.416.194,00 | 545.720.518,00 | 50,00% | 272.860.259,00 | 18,40% | 0,06% | 0% | 100.411.837,00 | 18,40% |
| Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 161.361.846.714,00 | 74.481.108.642,00 | 50,00% | 37.240.554.321,00 | 9,44% | | | 7.030.386.050,00 | 9,44% |
| Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 39.748.106.000,00 | 38.817.581.000,00 | 50,00% | 19.408.790.500,00 | 6,49% | 1,43% | 22% | 2.520.057.700,00 | 6,49% |
| Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 492.896.800,00 | 2.363.286.800,00 | 50,00% | 1.181.643.400,00 | 5,04% | 0,07% | 1% | 119.000.000,00 | 5,04% |
| Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 121.120.843.914,00 | 33.300.240.842,00 | 50,00% | 16.650.120.421,00 | 13,19% | 2,50% | 19% | 4.391.328.350,00 | 13,19% |



| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------|----|-----------------------|---------------|
| Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 1.746.867.700,00 | 1.564.512.300,00 | 50,00% | 782.256.150,00 | 27,74% | | | 433.984.880,00 | 27,74% |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 869.288.200,00 | 757.874.100,00 | 50,00% | 378.937.050,00 | 38,20% | 0,16% | 0% | 289.516.930,00 | 38,20% |
| Fasilitasi Bantuan Hukum | 517.107.900,00 | 497.710.100,00 | 50,00% | 248.855.050,00 | 16,45% | 0,05% | 0% | 81.864.650,00 | 16,45% |
| Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 360.471.600,00 | 308.928.100,00 | 50,00% | 154.464.050,00 | 20,26% | 0,04% | 0% | 62.603.300,00 | 20,26% |
| Fasilitasi Kerjasama Daerah | 212.954.000,00 | 194.964.000,00 | 50,00% | 97.482.000,00 | 4,33% | | | 8.450.000,00 | 4,33% |
| Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 195.634.000,00 | 177.644.000,00 | 50,00% | 88.822.000,00 | 4,76% | 0,00% | 0% | 8.450.000,00 | 4,76% |
| Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 17.320.000,00 | 17.320.000,00 | 50,00% | 8.660.000,00 | 0,00% | 0,00% | 0% | 0,00 | 0,00% |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1.587.607.000,00 | 1.274.845.000,00 | 50,00% | 637.422.500,00 | 27,65% | | | 352.531.100,00 | 27,65% |
| Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 246.300.200,00 | 175.150.200,00 | 50,00% | 87.575.100,00 | 29,58% | | | 51.801.100,00 | 29,58% |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 162.355.200,00 | 77.005.200,00 | 50,00% | 38.502.600,00 | 48,58% | 0,02% | 0% | 37.406.100,00 | 48,58% |
| Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 66.870.000,00 | 81.070.000,00 | 50,00% | 40.535.000,00 | 17,76% | 0,01% | 0% | 14.395.000,00 | 17,76% |
| Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | 17.075.000,00 | 17.075.000,00 | 50,00% | 8.537.500,00 | 0,00% | 0,00% | 0% | 0,00 | 0,00% |
| Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 158.166.000,00 | 79.284.000,00 | 50,00% | 39.642.000,00 | 53,95% | | | 42.770.000,00 | 53,95% |
| Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 142.836.000,00 | 63.954.000,00 | 50,00% | 31.977.000,00 | 59,10% | 0,02% | 0% | 37.800.000,00 | 59,10% |



| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----|-----------------------|---------------|
| Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 15.330.000,00 | 15.330.000,00 | 50,00% | 7.665.000,00 | 32,42% | 0,00% | 0% | 4.970.000,00 | 32,42% |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1.051.470.800,00 | 933.540.800,00 | 50,00% | 466.770.400,00 | 22,50% | | | 210.011.200,00 | 22,50% |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 97.860.000,00 | 51.360.000,00 | 50,00% | 25.680.000,00 | 73,30% | 0,02% | 0% | 37.648.000,00 | 73,30% |
| Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | 302.590.000,00 | 236.090.000,00 | 50,00% | 118.045.000,00 | 57,36% | 0,08% | 0% | 135.411.200,00 | 57,36% |
| Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 651.020.800,00 | 646.090.800,00 | 50,00% | 323.045.400,00 | 5,72% | 0,02% | 0% | 36.952.000,00 | 5,72% |
| Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 131.670.000,00 | 86.870.000,00 | 50,00% | 43.435.000,00 | 55,20% | | | 47.948.800,00 | 55,20% |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 112.880.000,00 | 68.080.000,00 | 50,00% | 34.040.000,00 | 55,95% | 0,02% | 0% | 38.092.800,00 | 55,95% |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 18.790.000,00 | 18.790.000,00 | 50,00% | 9.395.000,00 | 52,45% | 0,01% | 0% | 9.856.000,00 | 52,45% |
| | 243.892.705.843 | 175.917.106.887 | 50,00% | 87.958.553.444 | 28,99% | 28,99% | | 50.991.432.977 | 28,99% |



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2025 tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sudah baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Secara garis besar hasil analisis LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 pencapaian kerjanya diarahkan pada 4 (empat) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dengan 3 (tiga) Program Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2029, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Formulasi/Penjelasan | Target 2025 | Penanggungjawab |
|----|---|--|--|--|----------------------------|--|
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Sekretariat Daerah | | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada LHE Sakip | LHE Sakip KemenPAN-RB | 11,23 Bobot | Bagian Organisasi |
| | | | Indeks Reformasi Hukum | Indeks Reformasi Hukum (IRH) Online Kemenkumham | 60,49 Bobot Indeks | Bagian Hukum |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Pemerintahan dan Kesra | Persentase Kebijakan yang dihasilkan dari Fasilitasi dan Layanan Bidang Kesra yang Efektif | Perda, Perbup dan SK yang dilaksanakan / Jumlah Perda, Perbup dan SK terkait kebijakan bidang kesra yg diterbitkan x 100% | 100% | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Penilaian dari Kemendagri | 2,90 Indeks | Bagian Pemerintahan |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana / Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yg dibuat x 100% | 100% | Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan |
| | | | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | Dashboard Indeks Tata kelola Pengadaan barang dan Jasa (ITKP) Lembaga Kebijakan | Baik (78.01 - 82.00) Bobot | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |



| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|
| | | | | Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | | |
| | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Bidang Administrasi Umum | Tingkat Partisipasi Penilaian PEKPPP Mandiri | Penilaian dari KemenPAN-RB | 3,00 Predikat | Bagian Organisasi | |
| | | Tingkat Partisipasi Survei Budaya Kerja | Penilaian dari KemenPAN-RB | 17 Bobot | Bagian Organisasi | |
| | | Indeks Kematangan Organisasi | Rumusan Sesuai dengan Permendagri No. 99 Tahun 2018 | 36,50 Predikat | Bagian Organisasi | |
| | | Persentase Pelayanan Pimpinan Terfasilitasi | Jumlah Undangan dihadiri/Jumlah Total Undangan x 100% | 100% | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah | Nilai Sakip Sekretariat Daerah | LHE Sakip Inspektorat Daerah | 86,83 Indeks | Bagian Perencanaan dan Keuangan | |
| | | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Daerah | Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Masyarakat | 3,81 Indeks | Bagian Umum | |
| | | | | | | |

- b. Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang bersumber dari APBD untuk capaian program dan kegiatan pada triwulan II Tahun 2025 dalam upaya mencapai sasaran strategis, yaitu sebesar Rp 243.892.705.843. Melalui mekanisme Pergeseran Tahun 2025 jumlah anggaran menjadi Rp. 175.917.106.887. Sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 50.991.432.977, sehingga efisiensi anggaran yang dicapai Sekretariat Daerah Kota Banjar sebesar 21,61%.
- c. Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, diharapkan adanya kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah Kota Banjar diantaranya perlu dilakukan :
- Integrasi Dokumen Perencanaan.** Diperlukan adanya sinkronisasi Renstra, RKA, DPA, dan dokumen evaluasi secara berkala melalui pelatihan teknis dan supervisi
 - Penguatan Komitmen.** Melakukan pembinaan rutin dan monitoring berjenjang bagi pejabat dan pegawai terhadap penerapan akuntabilitas kinerja pemerintahan/SAKIP.
 - Peningkatan Kapasitas SDM.** Mengadakan pelatihan teknis dan manajerial untuk peningkatan kualitas pegawai.



4. **Optimalisasi Sarana dan Prasarana.** Melakukan inventarisasi ulang dan distribusi ulang asset sesuai beban kerja dan kebutuhan riil.
5. **Digitalisasi Proses Kerja.** Meningkatkan pelayanan berbasis digital terutama dalam pengelolaan dokumen dan layanan publik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah sebagai realisasi program kerja tahun 2025. Dengan tersusunnya LkjIP Sekretariat Daerah tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan/evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah di tahun akan datang.

Gunung Tinggi, September 2025
Sekretaris Daerah,

Yulian Herawati, S.E.,M.M.,CGCAE.,CFrA.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19790727 200604 2 042

